

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 telah membuka peluang kebebasan kehidupan politik Bangsa Indonesia. Rakyat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam segala kehidupan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembatasan yang selama puluhan tahun memasung aspirasi politik masyarakat hanya membuat sistem pemerintahan semakin bersifat otoriter dan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tentunya hal ini tidak dapat dipertahankan. Kehidupan politik kini memasuki babak baru yang penuh gairah. Hal ini ditandai dengan maraknya partai politik baru yang muncul dan berkompetensi pada pemilihan umum tahun 1999. Saat itu rakyat telah secara langsung terlibat dalam perpolitikan nasional.

Proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan kini tidak lepas dari adanya undang-undang mengenai otonomi daerah. Undang-undang yang mengatur otonomi daerah telah membawa kehidupan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena undang-undang yang baru tersebut memandang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan cara pandang yang berbeda dengan penyelenggaraan yang sebelumnya.

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diterangkan bahwa kepala daerah hanya bertanggungjawab kepada pemerintah pusat, sedangkan kepada DPRD kepala daerah hanya memberikan keterangan tentang pertanggungjawaban dalam bidang tugas pemerintahan daerah. Penerapan kembali prinsip otonomi daerah dan asas desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana terdapat perubahan yang menonjol terutama tentang pemilihan kepala daerah yang sebelumnya diselenggarakan dan dipilih oleh DPRD, sekarang diselenggarakan oleh KPU dan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Rakyat tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menentukan siapa calon bupati dan wakil bupati yang akan mereka dukung, banyak indikator yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih pasangan bupati dan wakil bupati diantaranya sosiologi, psikologi, rasional dan teori pemilih di Indonesia yaitu kepemimpinan tradisional.

Pada masa pemerintahan orde baru ada kecenderungan bahwa seorang pejabat sipil harus memilih salah satu partai politik itu karena adanya tekanan dari atasan, dan tidak menutup kemungkinan juga seorang anak dari pejabat sipil tersebut mengikuti perilaku orang tua mereka dalam berpolitik, yang menjadi pertanyaan apakah perilaku tersebut masih berlaku untuk sekarang ini.

Perwujudan dan bentuk partisipasi politik rakyat terutama dilaksanakan melalui prinsip kedaulatan rakyat, Artikulasi yang dapat mewadahi dan mewakili partisipasi politik rakyat tersebut salah satunya melalui pemilihan

umum. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana demokrasi yang penting sebagai perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pemilihan umum dijadikan tolak ukur sejauh mana negara itu benar-benar telah melaksanakan demokrasi.

Ritual demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun tersebut pada hakatnya bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional.

Rudini (1991:23) mengemukakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan sarana demokrasi untuk membuat suatu system kekuasaan suatu daerah yang pada dasarnya lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan.

Saat ini dibutuhkan sistem pemilu sebagai landasan pelaksanaannya. Pemilihan suatu system pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi setiap negara yang menganut sistem demokrasi, karena sistem yang dihasilkan turut menentukan nasib bangsa dimasa depan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, pengertian Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pilkada merupakan momentum penciptaan kesadaran hak dan kewajiban perpolitikan rakyat. Karena itu, selain KPUD sebagai lembaga resmi penyelenggara pilkada, masyarakat perlu mengawalinya, tidak saja saat tahapan penyelenggaraan pilkada, tetapi juga jauh sebelum pelaksanaan pilkada sehingga pesta demokrasi lokal ini benar-benar berlangsung secara *free and fair*. Ironisnya, realitas sosial politik hari ini memperlihatkan penyelenggara pilkada belum memunculkan gerakan kontrol dari tindakan-tindakan itu.

Berdasarkan perspektif sosiologi politik, sosialisasi tidak hanya sekedar mencari dukungan publik tetapi merupakan sebuah proses dimana seorang individu dapat mengenali sistem politik, kemudian menentukan sifat serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

Sosialisasi politik mencakup pengenalan tentang lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial masyarakat individu bersangkutan, juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik. Sosialisasi tersebut memberikan makna bahwa pembelajaran politik kepada publik dilakukan agar mereka mengenal sistem politik yang sedang berlangsung. Kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, sosialisasi bertujuan meningkatkan kualitas pemilih, maka pendidikan politik masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Sukses tidaknya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan mendatang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pemilih baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya serta faktor organisasi penyelenggara. Aspek

kuantitas mengenai hak masyarakat untuk mendapat dan diberi kesempatan memilih dan dipilih. Aspek kualitas berkaitan kesiapan pemilih menjalankan haknya selaku pemilih, termasuk dalam hal ini memilih figur yang benar-benar memiliki kemampuan dan keperibadian yang baik.

Perilaku pemilih adalah keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologi, sosiologis, rasionalitas pemilih atau disebut dengan teori *Voting Behaviour*.

Perilaku pemilih dalam penelitian ini adalah bentuk atau standarisasi perilaku untuk memilih atau memilih dalam memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan berdasarkan kehendak dan keinginan mereka.

Fenomena politik di Kampung Bali Sadhar Tengah belum memunculkan gerakan kontrol dan tindakan-tindakan yang mencerminkan asas-asas demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia, perilaku politik masyarakat Kampung Bali Sadhar Tengah tidak didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban perpolitikan rakyat dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Sosialisasi politik di Kampung Bali Sadhar Tengah tidak pernah diadakan, sehingga pemahaman masyarakat tentang pemilihan kepala daerah sangatlah minim. Masyarakat tidak pernah melakukan kontrol terhadap sistem politik yang sedang berlangsung. Karena itu partisipasi politik masyarakat di Kampung Bali Sadhar Tengah masuk dalam klasifikasi Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya

sangat rendah. Fenomena ini disebabkan dari tingkat pendidikan dan perekonomian yang masih rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Bali Sadhar Tengah menjadi salah satu faktor penyebab belum memunculnya gerakan kontrol dan tindakan-tindakan yang mencerminkan asas-asas demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia . Fenomena ini terlihat dari masih banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan. Sehingga perilaku pemilih Kampung Bali Sadhar Tengah sangat mudah di pengaruhi dan belum sampai ketinggian kategori sebagai pemilih yang rasional.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kampung Bali Sadhar Tengah tentang demokrasi dan hak-hak warga negara menjadikan masyarakat seperti sebuah wayang yang tidak mempunyai kehendak yang bebas dalam melakukan pilihan, dapat juga diibaratkan dengan pribahasa membeli kucing dalam karung, yang artinya pemilih dalam memilih bupati dan wakil bupati bukan atas dasar pertimbangan secara rasional melainkan berdasarkan pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial.

Fenomena ini menjadi sebuah jalan bagi para calon bupati dan wakil bupati melakukan pendekatan-pendekatan dengan menjalin hubungan dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat di Kampung Bali Sadhar Tengah.

Di Kampung Bali Sadhar Tengah Kepemimpinan Keliang Adat merupakan salah satu tokoh yang menonjol dan diduga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat Kampung Bali Sadhar Tengah untuk memilih salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan.

Disamping itu kepemimpinan akan berpengaruh terhadap komunikasi di dalam suatu organisasi/kelompok sosial yang ada. Dengan adanya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial akan mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan.

Kepada siapakah pemilih di Kampung Bali Sadhar Tengah menjatuhkan pilihannya? Tak seorang pun futurolog politik yang dapat memastikan hal ini. Tetapi salah satu variabel pokok yang dapat menentukan adalah hasil pemaknaan mereka terhadap materi kampanye legal maupun kampanye terselubung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan I Nyoman Tangkil (Sabtu, 6 Maret 2010) dapat dijabarkan sebagai berikut:

”Pemilih Di Kampung Bali Sadhar Tengah belum menunjukkan kemandirian karena belum mampu menerapkan asas-asas pemilihan kepala daerah yaitu: langsung, umum, bebas dan rahasia. Penyebabnya karena tingkat pendidikan, perekonomian yang masih rendah, pengaruh keagamaan dan kepemimpinan/ketokohan masih mempengaruhi masyarakat dalam memilih atau memihak kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan”.

Hasil observasi (pengamatan) yang dilakukan penulis (Sabtu, 27 Pebruari 2010) menggambarkan salah satu tim sukses dari salah satu kandidat datang untuk memberikan bantuan berupa materi kepada organisasi keagamaan di Kampung Bali Sadhar Tengah melalui kelian adat dengan maksud agar kelian adat dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih kandidat yang bersangkutan.

Hasil observasi (pengamatan) yang dilakukan penulis pada hari raya Ngembak Geni (Sabtu, 17 Maret 2010) di Pura Khayangan Tunggal terlihat kelian adat memberikan nasehat kepada masyarakat, dalam nasehatnya berisinya tentang ajaran darma dan dalam pembicaraannya juga mencoba untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih kandidat X dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2010. Ia memberikan pengaruh dengan mengucapkan ” *pilihlah calon bupati yang telah secara nyata peduli dengan kita, mau membantu kita. siapa dia? Dia adalah yang memberi bantuan kita saat membuat ogoh-ogoh, memberi bantuan kepada organisasi keagamaan kita dan dia yang sering hadir dalam acara-acara keagamaan maupun acara sosial lainnya*”.

Pendekatan yang dilakukan tim sukses kepada Kelian Adat Kampung Bali Sadhar Tengah menggambarkan tingkat keyakinan dari tim sukses yang bersangkutan kepada kelian adat sebagai pemimpin informal dan pemimpin formal masyarakat dapat mempengaruhi/mengarahkan perilaku politik pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis besarnya pengaruh Kepemimpinan Kelian Adat Kampung Bali Sadhar Tengah Kecamatan Banjit terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2010.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat penulis kemukakan rumusan masalahnya adalah :

”Seberapa Besar Pengaruh Kepemimpinan Kelian Adat Kampung Bali Sadhar Tengah terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2010?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh Kepemimpinan yang diterapkan oleh Kelian Adat Kampung Bali Sadhar Tengah terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2010.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian sebagai salah satu kajian manajemen pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan seorang tokoh adat dalam mempengaruhi perilaku pemilih.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap Kelian Adat dalam merefleksikan kepemimpinan terhadap perilaku pemilih.